

STRATEGI AMERIKA SERIKAT MEMBENDUNG PENGARUH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DI KAWASAN LAUT CINA SELATAN PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN DONALD TRUMP

Oleh: Muhammad Nizar Hamdi Nasution

Email: nizar.hamdinst@gmail.com

Pembimbing: Dr. Umi Oktyari Retnaningsih, MA

Bibliografi: 10 buku, 4 jurnal, 13 Website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru

Telp/Fax (0761) – 63277, 23430

Abstract

This study aims to explain the United States' containment strategy against the People's Republic of China in the South China Sea Region. After China's claims and military infiltration on islands in the South China Sea, it has created tension from several countries in the region, including the United States. The United States began implementing a series of strategies to stem China's hegemony in the South China Sea, which has the ambition to become a global power country.

The method used in this research is a qualitative research method. This qualitative research method has characteristics that understand, explain and describe the state of a fact. Data were taken from book documents, national and international scientific journals, official publications, and the internet.

The results of this study indicate that the United States during the Trump Administration was influenced by several factors in making policies. The writer sees this based on the foreign policy theory of James N. Rosenau which the writer uses. The United States carried out a series of policies to stem China's influence starting from the political, economic, diplomatic and military dimensions. The United States conducted a series of agreements and negotiations related to military assistance and development in several countries around the region through the Free and Open Indo-Pacific (FOIP) policy. On the military side, the United States sent its navy to conduct a series of navigation operations around islands claimed by China in the South China Sea.

Keywords: South China Sea, America, China, Containment

PENDAHULUAN

Sengketa Laut Cina Selatan sangat menarik perhatian masyarakat internasional khususnya wilayah Asia-Pasifik. Sengketa ini dianggap sebagai sengketa terpelik, terbesar dan terpanas abad 21. Hal itu dikarenakan keterlibatan banyak negara, seperti Tiongkok, sebagian besar anggota ASEAN dan negara Super Power, Amerika Serikat. Sengketa teritorial dan sengketa batas wilayah maritim merupakan hal yang mendorong negara-negara sekitar Laut Cina Selatan saling mengklaim kepemilikan wilayah laut dan darat di dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly. Kawasan Laut Cina Selatan memiliki wilayah yang luas dan terdapat banyak negara yang wilayah perairannya berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan atau negara-negara tersebut memiliki kedaulatan menurut ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982).

Kawasan Laut Cina Selatan merupakan wilayah yang strategis dan potensial dengan cadangan energi yang banyak, sumber daya alam yang melimpah dan merupakan jalur strategis. Energi memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian. The U.S. Energy Information Administration (EIA) memperkirakan Laut Cina Selatan mengandung sekitar 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik

gas alam cadangan yang terbukti dan terkira. Hidrokarbon konvensional sebagian besar berada di wilayah sengketa. Pada November 2012, *the Chinese National Offshore Oil Company* (CNOOC) memperkirakan daerah tersebut menyimpan sekitar 125 miliar barel minyak dan 500 triliun kaki kubik gas alam dalam sumber daya yang belum ditemukan.¹

Laut Cina Selatan menyumbang lebih dari 10 persen dari produksi tangkapan global, dan menampung 76 persen spesies karang dunia dan 37 persen spesies ikan karang.² Menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) salah satu organ Perserikatan Bangsa-Bangsa khusus untuk menangani isu perdagangan, investasi dan pembangunan memperkirakan bahwa Laut Cina Selatan mengangkut 1/3 dari total pengiriman dalam perdagangan global. Kebergantungan negara-negara kawasan, seperti Tiongkok, Taiwan, Jepang dan Korea Selatan. Data tahun 2016 menunjukkan bahwa 65% perdagangan Tiongkok melalui jalur laut. Sehingga sangat penting Laut Cina Selatan ini bagi Tiongkok.³ Tercatat nilai perdagangan global yang melewati Laut Cina Selatan berkisar \$5,3 triliun. Nilai tersebut termasuk di dalamnya \$1,2 triliun perdagangan

¹ U.S Energy Information Administration, South China Sea, https://www.eia.gov/international/analysis/regions-of-interest/South_China_Sea

² Zhang, Hongzhou, 2017 Fisheries cooperation in the South China Sea :

evaluating the options, *Marine Policy*, 89, hlm. 67-76

³ Cina Power. How Much Trade Transits the South China Sea? [How Much Trade Transits the South China Sea? | CinaPower Project \(csis.org\)](https://www.csinpower.org/How-Much-Trade-Transits-the-South-China-Sea/) diakses pada Senin 07 November 2022

Amerika Serikat yang melewati jalur Laut Cina Selatan.⁴

Hadirnya Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan bertujuan untuk menjadi kekuatan hegemoni yang sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Tiongkok, yaitu *Belt and Road Initiative* (BRI). Upaya yang Tiongkok lakukan dimotivasi oleh potensi yang besar yang terdapat di Kawasan Laut Cina Selatan, seperti cadangan energi, hasil laut, jalur pelayaran internasional, dan jalur perdagangan internasional. Seluruh potensi tersebut mampu meningkatkan *power* negara untuk menjadi hegemon. Terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan satu negara dikatakan *superpower*, yaitu: kekuatan ekonomi, kekuatan militer dan kekuatan geopolitik yang berada di atas negara-negara yang ada di dunia.⁵ Sehingga cukup Kawasan Laut Cina Selatan menjadi sumber yang dapat diolah oleh Tiongkok untuk mengarah pada negara *superpower* mengingat keberhasilan kebijakan BRI menjadikan ketergantungan negara-negara Kawasan Laut Cina Selatan khususnya pada aspek ekonomi dan bantuan infrastruktur.

Keadaan dan perilaku Tiongkok di Kawasan Laut Cina Selatan dipandang sebagai ancaman oleh Amerika Serikat. Sebab hal tersebut mengancam kepentingan Amerika Serikat yang tetap menghendaki agar hanya terjadi system internasional yang unipolar dan

tidak ada satu kekuatanpun yang mampu mengganggu dan mengancam keamanan Amerika Serikat.⁶ Amerika Serikat melihat bahwa kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan besar di wilayah Asia menjadikan motivasi tersendiri bagi Amerika Serikat untuk tidak hanya berfokus pada Timur Tengah, tetapi juga kawasan-kawasan lain dalam upaya menjaga agar tidak adanya kekuatan baru yang dapat mengimbangi Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki kekuatan yang besar (*great power*). Amerika Serikat pada masa Presiden Barack Obama mengeluarkan kebijakan *Pivot to Asia* sebagai upaya untuk melakukan perimbangan kekuatan di Asia terhadap rivalitasnya, Tiongkok. Upaya tersebut dimulai pada saat Presiden Obama melakukan kunjungan ke Australia dan melakukan kesepakatan kerjasama peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat di wilayah Asia dan Pasifik. Hal tersebut secara berangsur-angsur Amerika Serikat terus mengirimkan pasukannya ke Asia dan Pasifik yang sebelumnya banyak ditempatkan di kawasan Timur Tengah.⁷

Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Presiden Trump selalu berupaya menahan dan membatasi gerak Tiongkok di Laut Cina Selatan, seperti melakukan protes, ancaman dan sanksi keras terhadap perilaku Tiongkok di kawasan dan langkah-langkah Tiongkok untuk selalu

⁴ Cina Power. How Much Trade Transits the South Cina Sea? [How Much Trade Transits the South Cina Sea? | CinaPower Project \(csis.org\)](https://www.csis.org/analysis/how-much-trade-transits-the-south-cina-sea) diakses pada Senin 07 November 2022

⁵ Kiczma, Lukasz dan Miroslaw Sulek, 2020. *National Power Rankings of Countries 2020*, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, hlm. 19

⁶ Yuan Kang Wan, 2006. *Cina Grand Strategy and U.S Primacy: Is Cina Balancing American Power*, The Brooking Institution Center for Northeast Asian Policy Studies : Washington, DC, hlm. 6

⁷ Nainggolan, Poltak Partogi, 2013. *Kepentingan Strategis Amerika Serikat di Asia Pasifik. Politica*, Vol. 4, No. 1, hlm. 78 - 80

meningkatkan aktivitasnya di kawasan. Namun hal tersebut tidak serta merta diterima oleh Tiongkok. Tiongkok merespon kebijakan Presiden Trump tersebut dengan beberapa cara, seperti mengomentari perilaku Trump yang lebih sering membuka kerjasama bilateral dengan negara-negara di kawasan yang diklaim Tiongkok sebagai salah satu langkah yang salah yang dapat memicu adanya konflik besar di kawasan. Tiongkok juga dengan sangat percaya diri melakukan parade militer di kawasan Laut Cina Selatan, khususnya di sekitar kawasan yang diklaim oleh Tiongkok sebagai sinyal kepada negara-negara yang hendak menghalanginya termasuk Amerika Serikat bahwa Tiongkok tidak main-main dalam keputusannya ingin menjadi kekuatan pengatur di kawasan Laut Cina Selatan.⁸

Keberadaan dua negara besar di Kawasan Laut Cina Selatan mengakibatkan ketegangan yang tidak biasa dan berpotensi menciptakan konflik terbuka. Amerika Serikat pasti tidak ingin Tiongkok berhasil melakukan keinginan besarnya dan terus menebar pengaruh di Kawasan Laut Cina Selatan yang menyebabkan seluruh negara di kawasan menjadi tunduk pada Tiongkok. Di sisi lain Tiongkok juga tidak main-main dengan strategi yang diambil dan ancaman yang dilontarkan. Karenanya penulis ingin menggali dan menganalisis bagaimana strategi Amerika Serikat membendung pengaruh Republik Rakyat Tiongkok di Kawasan Laut

Cina Selatan pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump.

KERANGKA TEORI

Perspektif: *Neorealisme*

Dalam tulisan ini penulis menggunakan perspektif *Neorealisme*. Perspektif neorealisme merupakan sebuah perspektif yang hadir untuk menggantikan perspektif realisme yang dianggap masih memiliki ketidakidealan dan kekurangan di dalamnya dalam menjelaskan fenomena hubungan internasional saat ini. Neorealisme hadir sebagai perspektif yang mengkaji fenomena hubungan internasional saat ini yang sifatnya semakin kompleks seiring dengan berkembangnya zaman.⁹

Perspektif neorealisme juga dapat dikatakan sebagai realisme struktural, karena pembahasan yang terdapat di dalam neorealisme cenderung mengarah kepada struktur internasional. Perspektif neorealisme mempercayai bahwa di dalam struktur internasional tidak ada pemerintahan yang jauh lebih tinggi dari suatu negara, oleh karena itu kaum neorealis meyakini bahwa tatanan sistem internasional yang terjadi bersifat anarki. Sifat anarki yang terdapat di dalam sistem internasional dapat terjadi karena tiga hal yaitu, aktor-aktor bukan negara tidak memiliki kewenangan dan otoritas melebihi suatu negara, negara merupakan sebuah aktor yang sangat penting dan utama di dalam sistem internasional, terdapatnya suatu

⁸ Adam Singer, 2020. *Obama, Trump, and Xi: Three South Cina Sea Strategies in the U.S. Cina Battle for Global Hegemony*, Claremont Collage, hlm. 10 - 12

⁹ David Allen Baldwin, 1993. *Neorealisme and Neoliberalism: The Contemporary Debate*, New York: Columbia University Press

interaksi antar negara yang melibatkan *power* di dalamnya.¹⁰

Perspektif neorealisme pertama kali dicetuskan oleh seorang ahli yang bernama Kenneth Waltz pada tahun 1970-an melalui bukunya yang berjudul *Theory of International Politics*. Kenneth Waltz menjelaskan bahwa adanya pendekatan yang mengarah pada suatu sistematis. Pendekatan sistematis itulah yang merupakan cerminan dari struktur internasional yang terjadi. Perspektif neorealisme memandang bahwa aktor negara merupakan aktor yang paling utama di dalam hubungan internasional dan sistem internasional yang bersifat anarki mengakibatkan perilaku setiap negara menjadi berlomba-lomba untuk memperebutkan kekuasaan dan menjadi yang paling dominan dari yang lainnya.¹¹

Perspektif neorealisme memiliki empat asumsi dasar yaitu:

1. Perspektif neorealisme memandang bahwa negara merupakan aktor yang sangat penting dan utama di dalam hubungan internasional dan sistem internasional yang terjadi memiliki sifat yang anarki,
2. Kaum neorealis mempercayai bahwa *distribution of power* merupakan salah satu indikator yang sangat penting dan dapat digunakan untuk memberikan pengenalan terhadap perilaku atau tindakan suatu negara di dalam struktur internasional,

3. Perspektif neorealisme meyakini bahwa pertahanan merupakan suatu aspek yang bersifat fundamental bagi seluruh negara di dalam sistem internasional,

4. Kaum neorealis melihat bahwa dengan dilakukannya suatu kerja sama internasional antar suatu negara dengan negara lainnya dengan melibatkan *power* di dalamnya dapat mempermudah untuk mencapai kepentingan nasional pada setiap negara tersebut.¹²

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dikatakan bahwa sistem internasional yang anarki pula yang memotivasi negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan dan negara *great powers* seperti Tiongkok dan Amerika Serikat melakukan tindakan yang mengancam keamanan sebagai akibat dari distribusi kekuatan dalam sistem internasional dengan maksud berlomba-lomba dalam memperebutkan *power* agar menjadi negara yang paling dominan dalam sistem internasional.

Teori: Kebijakan Luar Negeri

Penelitian ini menggunakan Teori Kebijakan Luar Negeri James. N. Rosenau. Menurut Rosenau kebijakan luar negeri adalah upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh kepentingan nasionalnya melalui lingkungan eksternalnya atau di luar dari teritorinya. Kebijakan luar

¹⁰ John J. Mearsheimer, 2007. *Structural Realism* dalam Tim Dunne, dkk, *International Relations Theories*, Oxford: Oxford University Press

¹¹ Kenneth N. Waltz, 2010. *Theory of International Politics*, Illinois, Waveland Press

¹² David Allen Baldwin, *Op.cit.*

negeri ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan keberlangsungan hidup suatu negara. Lebih lanjut, apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri maka kita perlu mengkaji fenomena yang lebih luas dan kompleks, tidak hanya kehidupan internal suatu negara namun juga kebutuhan eksternal. Kebutuhan internal dan eksternal tersebut dapat kita amati pada atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas social, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara-bangsa.¹³

James N. Rosenau dalam pandangannya mengatakan bahwa kebijakan luar negeri berhubungan dengan lima faktor, yaitu:¹⁴

1. Faktor individu dan personalitas pengambilan kebijakan.
2. Faktor peran dan jangkauan otoritas pengambilan keputusan.
3. Faktor birokratis.
4. Faktor komunitas.
5. Faktor sistem internasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Tiongkok akan dipengaruhi oleh beragam faktor. Faktor-faktor tersebut bisa jadi berasal dari kondisi geopolitik yang ada di kawasan Laut Cina Selatan. Selain itu, dalam mengaplikasikan teori ini, penulis hanya akan menjelaskan tiga faktor dari lima faktor yang ada, yaitu

faktor otoritas, birokratis dan sistem internasional.

Konsep: *Containment Strategy*

Peneliti memilih konsep pembendungan (*containment strategy*) untuk menggambarkan strategi yang digunakan oleh Amerika Serikat menghadapi Tiongkok di Kawasan Laut Cina Selatan. keadaan kompleks yang dihadapi Amerika Serikat, *containment* menjadi salah satu strategi yang masuk akal untuk dilakukan oleh Amerika Serikat. *Containment* bertujuan untuk mempertahankan batas-batas tertentu melawan agresor spesifik yang mengancam kepentingan Amerika di wilayah tertentu atau yang berjuang untuk hegemoni dunia, baik melalui penggunaan kekuatan militer untuk pencegahan dan pertahanan.¹⁵ Mempertahankan kepentingan Amerika Serikat dengan cara menahan hegemoni Tiongkok di kawasan seperti Laut Cina Selatan merupakan usaha Amerika Serikat paling masuk akal untuk dilakukan dibandingkan secara agresif melakukan mempertahankan wilayah kepentingan Amerika Serikat. *Containment* memungkinkan Amerika Serikat mengawasi keadaan dan membuat Tiongkok tidak bisa secara leluasa di wilayah kepentingan Amerika Serikat seperti kawasan Laut Cina Selatan.

Containment tidak hanya mempertahankan batas-batas tertentu tanpa intervensi langsung yang lebih besar. Menurut Robert J Art, dalam

¹³ James N. Rosenau, dkk. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, hal. 15-32

¹⁴ James N. Rosenau. 1971. *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: the Free Press, hal. 98

¹⁵ Robert J. Art, 2009. *America's Grand Strategy and World Politics*, Amerika Serikat: Cornell University Press hlm 83.

strategi *Containment* Amerika Serikat akan memberikan mandat untuk keterlibatan langsung hanya bila diperlukan, dalam tujuan untuk menggagalkan pertumbuhan pengaruh dan kekuatan calon hegemon yang berpotensi mengganggu kepentingan Amerika Serikat.¹⁶

Sejak 1947 Amerika Serikat sudah melakukan strategi *Containment* dalam usaha menekan kebijakan luar negeri Uni-Soviet dan mempromosikan kebijakan anti-komunisme diberbagai kawasan. Strategi *Containment* terhadap Tiongkok juga bukan pertama kali dilakukan Amerika Serikat. Status quo dari Taiwan juga membuat Amerika Serikat harus melakukan strategi *Containment* pada permasalahan Taiwan dan Tiongkok. Strategi ini tidak bisa dibilang efektif menekan pertumbuhan hegemoni Tiongkok secara signifikan, namun strategi ini membantu mengamankan kepentingan Amerika Serikat diberbagai wilayah dengan dampak politik yang relatif kecil dibandingkan harus langsung menekan Tiongkok. Permasalahan dari *Containment* adalah *cost* ekonomi yang harus ditanggung Amerika Serikat ketika mengirim pasukan ke area-area yang jauh dari wilayah Amerika Serikat. Namun hal ini dapat diatasi dengan basis - basis militer *Overseas* Amerika Serikat diberbagai kawasan seperti di Korea Selatan dan Jepang pada wilayah Asia Timur atau Singapura di kawasan Asia Tenggara.

Metode Penelitian

¹⁶ *ibid.*

¹⁷ Victor Teixeira. 2019. The United States' Cina Containment Strategy and the South Cina

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Metode penelitian kualitatif ini memiliki karakteristik yang memahami, menjelaskan dan mendeskripsikan keadaan dari sebuah fakta. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan dokumen. Dengan metode ini penulis akan mengumpulkan data dan informasi sekunder yang diambil dari dokumen buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, terbitan resmi, dan internet yang berkaitan dengan topik yang penulis teliti.

PEMBAHASAN

Kebijakan Luar Negeri AS pada Masa Pemerintahan Trump di Kawasan Laut Cina Selatan.

Perhatian Amerika Serikat terhadap Asia pada umumnya dan kawasan Laut Cina Selatan pada khususnya adalah mempertahankan status *quo* agar dimana hegemoni Amerika Serikat mendominasi di kawasan. Tiongkok hadir sebagai *emerging power* yang bangkit sebagai kekuatan regional dan berambisi menuju negara berkekuatan global. Tentunya ini menjadi antitesis dari tatanan global yang mengancam hegemoni yang dimiliki Amerika Serikat.¹⁷

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Trump bersesuaian dengan slogan kampanye yang ia sampaikan pada pemilihan umum AS, yakni "*America First*" dan "*Make America Great Again*". Slogan

Dispute. *Central European Journal of International and Security Studies*, Vol. 13, No. 3, hlm. 166-193

ini memandang bahwa Amerika Serikat perlu melindungi kepentingannya dari aktor luar yang merusak posisinya sebagai negara terkuat di dunia. Serangkaian kebijakan luar negeri utama yang disorot dan menjadi bagian dari strategi pembendungan pada pemerintahan Trump dimana ia memiliki strategi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP). FOIP hadir sebagai kebijakan alternatif dan kompetitif dari program *Belt and Road Initiative* (BRI). Trump langsung menyasarkan kebijakannya kepada Tiongkok sebagaimana yang dapat dilihat pada *US-Cina Diplomatic and Security Dialogue* pada tahun 2018 yang mendesak Tiongkok untuk menarik misil anti-kapal di pulau buatannya.¹⁸

Langkah-langkah Diplomatis Amerika Serikat pada Masa Pemerintahan Trump di Kawasan Laut Cina Selatan.

Terhadap langkah-langkah diplomatis yang diambil oleh Amerika Serikat adalah wujud bahwa Amerika Serikat tetap akan mempertahankan eskalasi konflik terbatas. Amerika Sebagai negara adidaya sebenarnya buakan lah langkah yang paling efektif. Namun jika dilihat melalui faktor sistem internasional yang mempengaruhi kebijakan luar negeri yang dijelaskan Rosenau, maka dapat dilihat pula pertimbangan lain dari Amerika Serikat, seperti kondisi Tiongkok sebagai pihak yang sangat

berpengaruh secara ekonomi terhadap negara-negara kawasan hingga faktor jauhnya letak Amerika Serikat dengan Laut Cina Selatan.

Kerjasama Pertahanan-Keamanan dan Intelijen Amerika Serikat di Kawasan Laut Cina Selatan.

Amerika Serikat melakukan kerjasama pertahanan-kemanan dengan beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Filipina dan Vietnam.

1. Indonesia.¹⁹

Amerika dan Indonesia memiliki sejarah hubungan bilateral yang baik dan telah berlangsung selama 70 tahun. Amerika Serikat melalui *Foreign Military Sales (FMS) System* memiliki penjualan senjata dengan Indonesia senilai 1,88 miliar dolar AS. Terhitung dari tahun anggaran 2015 hingga 2019, Amerika Serikat telah mengeksport senjata, alat-alat elektronik, dan pesawat senilai 546 juta dolar AS melalui *Direct Commercial Sales (DMS)*.

Pada tahun anggaran 2020, Indonesia menerima pendanaan militer asing (*Foreign Military Financing*) senilai 14 juta dolar AS dan lebih dari 2,3 juta dolar AS untuk pendanaan Pelatihan dan Pendidikan Militer. Menteri Pertahanan AS menyediakan Indonesia 22,6 juta dolar AS

¹⁸ US Department of State, 2018. US-Cina Diplomatic and Security Dialogue, *Media Note*, <https://2017-2021.state.gov/u-s-Cina-diplomatic-and-security-dialogue-3/index.html> (diakses pada tanggal 3 Oktober 2022 pukul 10.03 WIB)

¹⁹ U.S. Bureau of Political-Military Affairs. 2021. U.S. Security Cooperation with Vietnam. *Fact Sheet*. <https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-indonesia/> (diakses pada 6 Oktober 2022 pukul 7.13 WIB)

sebagai bantuan keamanan. Indonesia masuk dalam negara sasaran *Maritime Security Initiative* yang merupakan bagian dari strategi FOIP dan menyediakan lebih dari 5 juta dolar AS untuk mendukung pembangunan kapasitas instritusional pertahanan dari tahun anggaran 2016 hingga 2020.

Bantuan ini bertujuan untuk peningkatan dalam perencanaan strategi dan keamanan maritim. Kedua negara saling bekerja sama dalam berbagi informasi seputar pertahanan-keamanan melalui *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA), dan *Communications Interoperability and Security Memorandum of Agreement* (CISMOA).

2. Filipina.²⁰

Kementerian Luar Negeri AS pada 1 Maret 2019 mengatakan akan berkomitmen akan melindungi negara sekutunya–Filipina–yang berdasarkan pada *U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty*. Kerjasama pertahanan timbal balik tersebut ditingkatkan melalui perjanjian *Enhanced Defence Cooperation Agreement*

(*EDCA*) pada tahun 2014. Melalui *EDCA* inilah diberi ruang bagi pasukan AS untuk mengadakan latihan dan aktivitas militer gabungan dan bantuan humaniter dan berlanjut hingga masa kepemimpinan Trump.

Menteri Pertahanan AS menyediakan bantuan keamanan tambahan senilai 237 juta dolar AS pada awal tahun 2018.

Pada tahun 2019, melalui penjualan pemerintah-pemerintah, Filipina telah membeli helikopter tempur 48 S70i Black Hawk senilai 865 juta dolar AS.

Dari tahun anggaran 2019 hingga tahun anggaran 2021, AS mengesahkan ekspor permanen alat pertahanan ke Filipina senilai 171,3 juta dolar AS melalui Penjualan Komersial Langsung (DCS). Pembelian senjata tersebut meliputi senjata api, senapan tempur, kendaraan peluncur, rudal, roket dan torpedo.

3. Vietnam.²¹

Amerika Serikat dan Vietnam terhitung telah mengadakan 11 kali Dialog Politik, Keamanan dan Pertahanan untuk mendiskusikan

²⁰ U.S. Bureau of Political Military Affairs. 2022. US Security Cooperation with the Philippine. *Fact Sheet*, <https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-the-philippines/> (diakses pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 00.47 WIB)

²¹ U.S. Bureau of Political-Military Affairs. 2021. “U.S. Security Cooperation with

Vietnam.” *Fact Sheet*. <https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-vietnam/> (diakses pada 6 Oktober 2022 pukul 7.29 WIB) dan Bill Gertz. 2017. “Trump Courts Vietnam to Ward Off Beijing in South Cina Sea”. *Asia Times*. <https://asiatimes.com/2017/11/trump-courts-vietnam-ward-off-beijing-south-cina-sea/> (diakses pada 6 Oktober 2022 pukul 7.50 WIB)

kerjasama bilateral dalam pertahanan dan berbagi informasi intelijen. Pada tahun 2018 hingga 2020 terdapat dua kunjungan kapal induk AS di negara Vietnam yaitu USS Carl Vinson dan USS Theodore Roosevelt dalam rangka pertukaran budaya.

Amerika Serikat mengeksport senjata penunjang melalui skema *Direct Commercial Sales (DCS)*. Selain itu, juga penjualan senjata melalui skema FMS sebesar 162 juta dolar AS. Dari tahun anggaran 2017 hingga 2021, Vietnam menerima sekitar 60 juta dolar AS bantuan keamanan serta dari program *Foreign Military Financing (FMF)* senilai 20 juta dolar AS. FMF merupakan strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat.

Kerjasama Perdagangan dan Investasi Amerika Serikat di Kawasan Laut Cina Selatan

Adapun beberapa tindakan dan kerjasama yang disorot adalah sebagai berikut.²²

1. Amerika Serikat mengadakan kerjasama terkhusus pada negara sekutu dan mitra yang strategis di kawasan. *Asia Reassurance Initiative Act (ARIA)*, melalui kebijakan ini Amerika Serikat mendedikasi 1,5 miliar dolar AS setiap tahunnya dalam meningkatkan keterlibatan politik, diplomatik dan ekonomi

dengan negara-negara di kawasan. Kebijakan ini terutama menyoroti hubungan Amerika Serikat dan ASEAN terutama perdagangan. Negara-negara yang memperoleh manfaat dari kebijakan ini adalah Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam.

2. *Better Utilisation of Investments leading to Development (BUILD) Act* adalah program dukungan bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur di negara berkembang dan membantu negara sasaran dalam resiko berkaitan dengan pinjaman asing. Pada tahun 2018, program ini telah mendukung inisiatif infrastruktur dan energi di Asia.
3. *US-ASEAN Smart Cities Partnership*, bertujuan dalam mendukung transformasi digital di pusat perkotaan negara-negara Asia Tenggara.
4. *Indo-Pacific Transparent Initiatives*, membantu negara-negara di kawasan dalam memperoleh investasi swasta, membatasi praktik korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
5. *US-Support for Economic Growth in Asia (US-SEGA) Program* dalam rangka membangun kapasitas negara-negara APEC dengan kebijakan perdagangan dan investasi komprehensif.

²² Bryon Chong. 2020. "The Trump Administration's Record on Southeast Asia." *Observer Research Foundation*.

<https://www.orfonline.org/expert-speak/trump-administration-record-southeast-asia/> (diakses pada 7 Oktober 2022 pukul 8.45 WIB)

Agresifitas Amerika Serikat terhadap Tiongkok terkait Isu Laut Cina Selatan.

Beberapa tindakan spesifik Amerika Serikat pada masa pemerintahan Trump yang bersinggungan dengan Tiongkok adalah sebagai berikut:

1. Menteri Pertahanan Amerika Serikat pada 23 Mei 2018 mengumumkan bahwa Tiongkok tidak diundang pada latihan militer gabungan *Rim of the Pacific* (RIMPAC) tahun 2018.²³
2. Pada November 2018, penasihat keamanan nasional, John Bolton, mengatakan bahwa AS akan menentang setiap perjanjian antara Tiongkok atas tindakan negara tersebut di Laut Cina Selatan yang membatasi kebebasan bagi pelayaran internasional.²⁴
3. Pada Januari 2019, Amerika Serikat saat itu oleh Kepala Operasi Angkatan Laut, Laksamana John Richardson, memperingatkan Tiongkok bahwa angkatan laut AS akan

memperlakukan penjaga pantai dan kapal milisi maritim Tiongkok sebagai kombatan dan akan menanggapi provokasi mereka.²⁵

4. Pada 26 Agustus 2022, Sekretaris Pompeo, saat itu mengumumkan bahwa Amerika Serikat telah mulai memaksakan pembatasan visa pada Republik Rakyat Tiongkok atas tindakan mereka dalam mereklamasi pulau, konstruksi pos militer di wilayah yang bersengketa dan menghambat akses sumber daya negara-negara Asia Tenggara.²⁶
5. Pada 14 Januari 2021, Menteri Luar Negeri Pompeo mengumumkan sanksi tambahan terhadap pemerintahan Tiongkok, meliputi eksekutif BUMN dan pejabat Partai Komunis Tiongkok dan Angkatan Laut Tiongkok,
6. Pada 14 Januari 2021, Menteri Perdagangan AS menambahkan BUMN Tiongkok *Chinese National Offshore Oil Corporation (CNOOC)* ke dalam daftar larangan ekspor akibat dari

²³ Missy Ryan. 2018. "Pentagon Disinvites Cina from Major Naval Exercise over South Cina Sea Buildup." *Washington Post*. https://www.washingtonpost.com/world/national-security/pentagon-disinvites-cina-from-major-naval-exercise-over-south-cina-sea-buildup/2018/05/23/8aea6f04-5ea1-11e8-b2b8-08a538d9dbd6_story.html (diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 9.00 WIB)

²⁴ Jake Maxwell Watts. 2018. "Bolton Warns Cina Against Limiting Free Passage in South Cina Sea." *Wall Street Journal*. <https://www.wsj.com/articles/bolton-warns-cina-against-limiting-free-passage-in-south-cina-sea-1542110191> (diakses pada 7 Oktober 2022 pukul 9.00 WIB)

²⁵ James Kraska. 2020. "Cina's Maritime Militia Vessels May be Military Objectives During Armed Conflict." <https://thediplomat.com/2020/07/Cinas-maritime-militia-vessels-may-be-military-objectives-during-armed-conflict/> (diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 9.00 WIB)

²⁶ Department of State. 2020. "U.S. Imposes Restriction on Certain PRC State Owned Enterprises and Executives for Malign Activities in the South Cina Sea." *Press Statement*. <https://vn.usembassy.gov/u-s-imposes-restrictions-on-certain-prc-state-owned-enterprises-and-executives-for-malign-activities-in-the-south-cina-sea/> (diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 9.15 WIB)

intimidasi perusahaan tersebut kepada negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan.

Freedom of Navigation Operation (FONOP) Amerika Serikat pada Masa Pemerintahan Trump di Kawasan Laut Cina Selatan.

Pemerintahan Trump telah memberikan wewenang kepada Pentagon untuk melaksanakan operasi dan langkah strategis dalam rangka percepatan pengambilan keputusan di kawasan Laut Cina Selatan dari ahli di bidangnya. Sepanjang masa kepemimpinan Trump, strategi militer yang dicetus adalah *Freedom of Navigation Operation (FONOP)*. Hingga pada tahun 2019, FONOP yang dioperasikan Amerika Serikat berjumlah lebih dari dua kali lipat dari Obama lakukan selama delapan tahun. Operasi FONOP pada masa Trump telah membawa kapal angkatan laut AS dalam jarak tepat 12 mil laut dari pulau

Pada masa pemerintahan Trump diketahui bahwa adanya perencanaan penambahan jumlah kapal di Angkatan Laut dari 276 menjadi 350 dan meningkatkan semua peralatan kapal dalam layanan. Selain angkatan laut AS, pemerintahan Trump juga diketahui mengerahkan pesawat pengebom B-1B di operasi Laut Cina Selatan.²⁷ Operasi ini sempat

mengakibatkan perlambatan kegiatan pembangunan fasilitas di pulau-pulau kawasan Laut Cina Selatan. Akan tetapi, ketika pandemi COVID-19 melanda di seluruh dunia mengakibatkan aktivitas militer AS sempat berkurang dan Tiongkok mengambil peluang tersebut untuk memulai ulang pembangunan pulau.²⁸

Pada lain kesempatan, Trump juga melibatkan beberapa negara pemain besar di kawasan yang mana tergabung dalam *Quad*. Pemerintahan Trump juga mengajak partisipasi Australia dan Jepang dalam operasi FON gabungan serta meyakinkan Jepang untuk membeli peralatan militer lebih banyak. Pemerintahan Trump juga menggunakan *Quad* sebagai kendaraan bagi kepentingan militer, sebagaimana mereka berapa kali mengadakan latihan militer gabungan seperti operasi latihan militer gabungan *Talisman Saber* antara Amerika Serikat-Australia dengan diikuti oleh Jepang. Selain itu, juga pendirian ulang dialog pertahanan 2+2 dengan India.²⁹

Evaluasi Strategi Pembendungan Terhadap Pengaruh Tiongkok di Kawasan Laut Cina Selatan.

Sebagaimana yang telah diindikasikan oleh banyak pengkaji kawasan Laut Cina Selatan bahwa strategi Amerika Serikat yang

²⁷ Caitlin Doornbos. 2020. "Air Force Sends Pair of B-1B Bombers on Mission over South Cina Sea". *Stars and Stripes*. https://www.stripes.com/theaters/asia_pacific/air-force-sends-pair-of-b-1b-bombers-on-mission-over-south-Cina-sea-1.631302 (diakses pada 17 Oktober 2022 pukul 12.03 WIB)

²⁸ Mark Valencia, 2017. US FONOPs in the South Cina Sea: Intent, Effectiveness, and

Necessity, *The Diplomat*, <https://thediplomat.com/2017/07/us-fonops-in-the-south-Cina-sea-intent-effectiveness-and-necessity/> (diakses pada 2 Oktober 2022 pukul 9.09 WIB)

²⁹ Buchan, dkk. "The Past, Present, and Future of the Quadrilateral Security Dialogue." *Center for Strategic and International Studies*, Vol. 11.

diberlakukan di kawasan Laut Cina Selatan dinilai tidak efektif dalam membendung pengaruh Tiongkok. Hal paling dasar adalah fakta bahwa Tiongkok telah lebih dulu menjadi negara berkekuatan regional dan dunia serta menyediakan strategi yang lebih efektif dari Amerika Serikat. Menurut Ikenberry, supremasi militer Amerika Serikat sebagai strategi pembendungan tidak memberikan pengaruh yang signifikan di Asia. Melainkan Amerika Serikat harus lebih memperhatikan dimensi ekonomi yang mana lebih berpengaruh daripada kekuatan militer. Namun, pada pemerintahan Trump hal ini yang paling diabaikan.³⁰

KESIMPULAN

Amerika Serikat melihat bahwa kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan besar di wilayah Asia. Keterlibatan Amerika Serikat sebagai negara *super power* tidak lantas memudahkan Amerika Serikat melaksanakan serangkaian kepentingannya di kawasan Laut Cina Selatan. Mengingat Tiongkok memiliki kekuatan besar di kawasan lebih dulu daripada Amerika Serikat. Tiongkok telah membangun banyak pangkalan militer di sekitar Laut Cina Selatan, yang menyebabkan Amerika Serikat tidak dapat melakukan tindakan yang frontal dan beresiko perang yang besar.

Keadaan yang dihadapi Amerika Serikat berhadapan dengan Tiongkok sangat lah kompleks. Mengingat Tiongkok terlebih dahulu menyebar pengaruh di kawasan di

berbagai aspek. Karenanya kebijakan luar negeri Amerika Serikat sangat berpengaruh terhadap strategi yang diambil oleh Amerika Serikat. Pun strategi yang diambil tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. James N. Rosenau dalam pandangannya mengatakan bahwa kebijakan luar negeri berhubungan dengan lima faktor, yaitu: faktor individu dan personalitas pengambilan kebijakan, faktor peran dan jangkauan otoritas pengambilan keputusan, faktor birokratis, faktor komunitas, dan faktor sistem internasional. Oleh karena keadaan kompleks yang dihadapi Amerika Serikat, *Containment* menjadi salah satu strategi yang masuk akal untuk dilakukan oleh Amerika Serikat. *Containment* bertujuan untuk mempertahankan batas-batas tertentu melawan agresor spesifik yang mengancam kepentingan Amerika di wilayah tertentu atau yang berjuang untuk hegemoni dunia, baik melalui penggunaan kekuatan militer untuk pencegahan dan pertahanan.

Strategi *Containment* yang dilakukan Amerika Serikat dapat dilihat dari Politik, Ekonomi dan Militer. *Containment* pada sisi Politik, Trump menaruh perhatian terhadap Laut Cina Selatan dalam kebijakan *Free and Open Indo Pacific (FOIP)*. Dari sisi Ekonomi, Amerika mengenakan ‘tarif hukuman’ kepada Tiongkok dan memaksa perusahaan Amerika mencari rantai pasokan global lain. Keluar dari kemitraan *Trans-Pacific Partnership (TPP)* untuk

³⁰ Ikenberry, dkk. 2017. “Cina’s Emerging Institutional Statecraft, the Asian Infrastructure Investment Bank and the Prospects for Counter-Hegemony.” *Brookings Institution*.

<https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/04/Cinas-emerging-institutional-statecraft.pdf> (diakses pada 18 Oktober pukul 12.57 WIB)

mendorong negara Asia Tenggara melakukan diversifikasi dalam negosiasi. Strategi militer yang dicetuskan oleh Trump adalah *Freedom of Navigation Operation* (FONOP).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Art, Robert J. 2009. *America's Grand Strategy and World Politics*. Amerika Serikat: Cornell University Press

Baldwin, David Allen. 1993. *Neorealisme and Neoliberalism: The Contemporary Debate*, New York: Columbia University Press

Jinming, Li & Li Dexia. 2003. *The Dotted Line On The Chinese Map Of The South Cina Sea: A Note*, Ocean Development & International Law

Kiczma, Lukasz dan Mirosław Sulek, 2020. *National Power Rankings of Countries 2020*, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa

Mearsheimer, John J. 2007. *Structural Realism* dalam Tim Dunne, dkk, *International Relations Theories*, Oxford: Oxford University Press

Rosenau, James N. 1971. *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: the Free Press

Rosenau, James N. dkk. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press

Singer, Adam. 2020. *Obama, Trump, and Xi: Three South Cina Sea Strategies in the U.S. Cina Battle for Global Hegemony*, Claremont Collage

Waltz, Kenneth N. 2010. *Theory of International Politics*, Illinois, Waveland Press

Wan, Kang. 2006. *Cina Grand Strategy and U.S Primacy: Is Cina Balancing American Power*, The Brooking Institution Center for Northeast Asian Policy Studies

Jurnal

Buchan, dkk. "The Past, Present, and Future of the Quadrilateral Security Dialogue." *Center for Strategic and International Studies*, Vol. 11

Nainggolan, Poltak Partogi, 2013. *Kepentingan Strategis Amerika Serikat di Asia Pasifik*. *Politica*, Vol. 4, No. 1, hlm. 78 – 80

Victor Teixeria. 2019. *The United States Cina Containment Strategy and the South Cina Dispute*. *Central European Journal of International and Security Studies*, Vol. 13, No. 3, hlm. 166-193

Zhang, Hongzhou, 2017. *Fisheries cooperation in the South Cina Sea* :

evaluating the options,
Marine Policy, 89, hlm.
67-76

Website

Bryon Chong. 2020. "The Trump Administration's Record on Southeast Asia." *Observer Research Foundation*.
<https://www.orfonline.org/expert-speak/trump-administration-record-southeast-asia/> (diakses pada 7 Oktober 2022 pukul 8.45 WIB)

Caitlin Doornbos. 2020. "Air Force Sends Pair of B-1B Bombers on Mission over South Cina Sea". *Stars and Stripes*.
https://www.stripes.com/theaters/asia_pacific/air-force-sends-pair-of-b-1b-bombers-on-mission-over-south-Cina-sea-1.631302 (diakses pada 17 Oktober 2022 pukul 12.03 WIB)

Cina Power. How Much Trade Transits the South Cina Sea? [How Much Trade Transits the South Cina Sea? | CinaPower Project \(csis.org\)](https://www.cinapower.org/2022/11/07/how-much-trade-transits-the-south-cina-sea/) diakses pada Senin 07 November 2022

Department of State. 2020. "U.S. Imposes Restriction on Certain PRC State Owned Enterprises and Executives for Malign Activities in the South Cina Sea." *Press Statement*.
<https://vn.usembassy.gov/u-s-imposes-restrictions-on-certain-prc-state-owned-enterprises-and-executives->

[for-malign-activities-in-the-south-Cina-sea/](https://www.eia.gov/international/analysis/regions-of-interest/South-Cina-Sea/) (diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 9.15 WIB)

Energy Information Administration, South Cina Sea,
[https://www.eia.gov/international/analysis/regions-of-interest/South Cina Sea](https://www.eia.gov/international/analysis/regions-of-interest/South-Cina-Sea/)

Jake Maxwell Watts. 2018. "Bolton Warns Cina Against Limiting Free Passage in South Cina Sea." *Wall Street Journal*.
<https://www.wsj.com/articles/bolton-warns-Cina-against-limiting-free-passage-in-south-Cina-sea-1542110191> (diakses pada 7 Oktober 2022 pukul 9.00 WIB)

James Kraska. 2020. "Cina's Maritime Militia Vessels May be Military Objectives During Armed Conflict." <https://thediplomat.com/2020/07/Cinas-maritime-militia-vessels-may-be-military-objectives-during-armed-conflict/> (diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 9.00 WIB)

kenberry, dkk. 2017. "Cina's Emerging Institutional Statecraft, the Asian Infrastructure Investment Bank and the Prospects for Counter-Hegemony." *Brookings Institution*.
<https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/04/Cina-s-emerging-institutional->

[statecraft.pdf](#) (diakses pada 18 Oktober pukul 12.57 WIB)

Mark Valencia, 2017. US FONOPs in the South Cina Sea: Intent, Effectiveness, and Necessity, *The Diplomat*, <https://thediplomat.com/2017/07/us-fonops-in-the-south-Cina-sea-intent-effectiveness-and-necessity/> (diakses pada 2 Oktober 2022 pukul 9.09 WIB)

Missy Ryan. 2018. "Pentagon Disinvites Cina from Major Naval Exercise over South Cina Sea Buildup." *Washington Post*. https://www.washingtonpost.com/world/national-security/pentagon-disinvites-Cina-from-major-naval-exercise-over-south-Cina-sea-buildup/2018/05/23/8aea6f04-5ea1-11e8-b2b8-08a538d9dbd6_story.html (diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 9.00 WIB)

U.S. Bureau of Political Military Affairs. 2022. US Security Cooperation with the Philippine. *Fact Sheet*, <https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-the-philippines/> (diakses pada

tanggal 5 Oktober 2022 pukul 00.47 WIB)

U.S. Bureau of Political-Military Affairs. 2021. "U.S. Security Cooperation with Vietnam." *Fact Sheet*. <https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-vietnam/> (diakses pada 6 Oktober 2022 pukul 7.29 WIB) dan Bill Gertz. 2017. "Trump Courts Vietnam to Ward Off Beijing in South Cina Sea". *Asia Times*. <https://asiatimes.com/2017/11/trump-courts-vietnam-ward-off-beijing-south-Cina-sea/> (diakses pada 6 Oktober 2022 pukul 7.50 WIB)

U.S. Bureau of Political-Military Affairs. 2021. U.S. Security Cooperation with Vietnam. *Fact Sheet*. <https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-indonesia/> (diakses pada 6 Oktober 2022 pukul 7.13 WIB)